

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Politik

Menurut James A. Caporaso dan David P. Levine ekonomi politik pada pendekatan ekonomi terhadap politik adalah:

“Ilmu yang menelaah hubungan antara wilayah ekonomi dengan wilayah politik atau antara subsistem ekonomi dengan subsistem politik. dengan kata lain, menurut pendekatan ekonomi terhadap politik, ekonomi politik bukanlah sebuah telaah tentang apa yang akan terjadi ketika wilayah ekonomi bertemu dengan wilayah politik melainkan ekonomi politik berarti penerapan penalaran ekonomi terhadap proses-proses politik.”⁷.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2006) dalam buku Ekonomi Politik Pemburuan Rente Proyek Publik, cakupan ilmu ekonomi politik (*political economy*) lebih luas dari jangkauan ilmu ekonomi tradisional. Fokus ekonomi politik adalah proses-proses sosial serta institusional yang memungkinkan kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumberdaya produktif yang persediaanya selalu terbatas sekarang atau di masa yang akan datang, baik secara khusus untuk keuntungan sendiri atau kelompok, maupun secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Menurut Todaro, ilmu ekonomi politik adalah membahas kaitan

⁷ Caporaso, James A dan David P. Levine. 2015. Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 305.

antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, dengan perhatian utama pada peranan kekuasaan dalam pembuatan keputusan ekonomi⁸.

2.2. Pendekatan Klasik

Pendekatan klasik dalam ekonomi politik merupakan sebuah kerangka yang berisi tema-tema utama dari ekonomi politik yang disusun dengan cara unik. Ilmu ekonomi politik dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang ekonomi adalah bidang yang lebih penting daripada yang lain.

Ekonomi politik memandang bahwa telah terjadi perubahan pada hubungan antara hubungan antara kehidupan politik dengan kegiatan-kegiatan non-politik yang diistilahkan secara longgar sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pribadi⁹.

Ekonomi politik memberikan dorongan yang besar bagi pergeseran focus semacam ini di mana penekanan terhadap politik dikurangi dan di geser kearah pemahaman terhadap factor-faktor yang dapat menjelaskan perubahan-perubahan historis besar yang membenruk dunia sosial.

Pasar yang mengatur dirinya sendiri

Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu-individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual. Ketika penjual menjual komoditas, maka penjual mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhannya.

⁸ Wardani, Aprillia Fitria dan Muhammad Findi. 2018. Ekonomi Politik Pemburuan Rente Proyek Publik. Bogor: IPB Press

⁹ Caporaso, James A dan David P. Levine. 2015. Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 70.

David Ricardo memamparkan “*orang memproduksi selalu dengan tujuan agar ia bisa menjual dan mengonsumsi dan begitu juga orang menjual selalu dengan tujuan agar bisa membeli komoditas lain, yang bisa berguna secara langsung baginya atau bisa berguna bagi kegiatan produksinya di masa depan. Maka Ketika seseorang melakukan produksi, ia dapat sekaligus menjadi konsumen bagi barangnya sendiri atau dapat menjadi pembeli dan konsumen dari barang-barang orang lain. Bisa jadi dia tidak tahu apa komoditas yang paling menguntungkan untuk ia produksi, tapi ketidaktahuan itu tidak mungkin berlangsung lama, sehingga ia pasti akan selalu bisa mencapai tujuannya, yaitu memiliki barang-barang lain. Karenanya dapat disimpulkan bahwa orang tidak mungkin akan terus-menerus memproduksi komoditas yang tidak diinginkan orang lain*”¹⁰.

Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Publik

Adam Smith memaparkan *semua individu (dalam pasar) selalu terus menerus berusaha untuk menemukan bagaimana cara terbaik untuk menanamkan kapital yang ia miliki. Memang yang ia tuju dalam pikirannya adalah kepentingan dirinya sendiri dan bukan kepentingan orang yang banyak. Namun kalau kita menelaah keuntungan yang didapatkan individu itu akan tampak bahwa keuntungan yang didapatkan individu itu akan tampak bahwa keuntungan dari individu itu akan dengan sendirinya mendorong dia untuk memanfaatkan kapital itu dengan cara yang paling menguntungkan bagi masyarakat.* (Coporaso hal 93)

¹⁰ Caporaso, James A dan David P. Levine. 2015. Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 85-86.

2.2 Pendekatan Berbasis Kekuasaan dalam Ekonomi Politik

Galbraith mengungkapkan pasar adalah sarana yang mempelancar fungsi dari kekuasaan kapitalisme industrial dan sekaligus menyembunyikan kekuasaan itu¹¹.

Konsep kekuasaan yang paling sederhana, paling banyak dianut dan paling mudah dipahami secara intuitif adalah pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita di dunia ini. Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan dari ide agar kita bisa mencapai tujuan kita harus melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai “probalitas bahwa seorang pelaku dalam hubungan sosial mampu melaksanakan kehendaknya sendiri biarpun ada hambatan, tanpa memerdulikan dasar-dasar untuk menentukan probalitas itu¹².

2.3. Pendekatan Berbasis Negara dalam Ekonomi Politik

Negara dalam pendekatan-pendekatan ini dipandang sebagai instrument atau sebagai institusi yang dimanfaatkan oleh individu tau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing.

¹¹ Op.cit., hlm389.

¹² Op.cit., hal 392.

Stephen Krasner negara adalah sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat¹³.

Stephen Krasner mendefinisikan negara dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, Negara adalah institusi atau sekumpulan intitusi yang bertanggung jawab untuk menetapkan nilai-nilai yang digunakan unuk menentukan kegunaan bagi mastarakat. Negara akan menentukan apa yang menjadi kepentingan nasional dari sebuah masyarakat dan kemampuan untuk mendefinisikan kepentingan nasional itu akan menentukan mana yang dapat dikatakan sebagai negara dan mana yang tidak. Kalau kepentingan nasional tidak ada, makan negara pun tidak ada¹⁴.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil referensi penelitian terdahulu yang dilakukan Rhinanda Avifa Fahmi (2018) yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Inisiatif OBOR (*One Belt One Road*) Tiongkok Terhadap Perkembangan Insfrakstruktur Indonesia Tahun 2017”.Penelitian tersebut terfokus pada bagaimana pengaruh inisiatif OBOR (*One Belt One Road*) Tiongkok terhadap perkembangan insfrastrktur di Indonesia pada tahun 2017. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Dokumenter dan Penulusuran data Online. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menjelaskan pengaruh inisiatif OBOR (*One*

¹³ Caporaso, James A dan David P. Levine, Op.cit., hlm 467.

¹⁴, Op.cit., hlm 468-469.

Belt One Road) Tiongkok terhadap perkembangan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2017 yang menghasilkan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok pada pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung bukan pada tol laut. Namun *One Belt One Road* tetap menjadi pendukung pembangunan Infrastruktur di Indonesia.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Engra Rahmadoni (2016) yang melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Ekonomi Dan Politik Indonesia Memilih Bekerjasama Dengan Tiongkok Dari Pada Jepang Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahun 2015”. Pada penelitian tersebut fokus penelitiannya mengapa Indonesia lebih memilih berhubungan bilateral dengan Tiongkok daripada Jepang dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 2015. Yang menyebabkan arus politik luar negeri dan kebijakan luar negeri pada tahun 2015 mengalami keharmonisan dengan Tiongkok serta menambah MoU dengan Tiongkok. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Indonesia akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Tiongkok. MoU pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang berjumlah 72 perjanjian sedangkan Jepang mengajukan 430 perjanjian.

Lalu penulis juga mengambil referensi penelitian terdahulu dari Nahdia Rachmayanti (2014) yang melakukan penelitian mengenai “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)”. Penelitian tersebut fokus penelitiannya yaitu mengenai bagaimana dinamika hubungan Indonesia dan

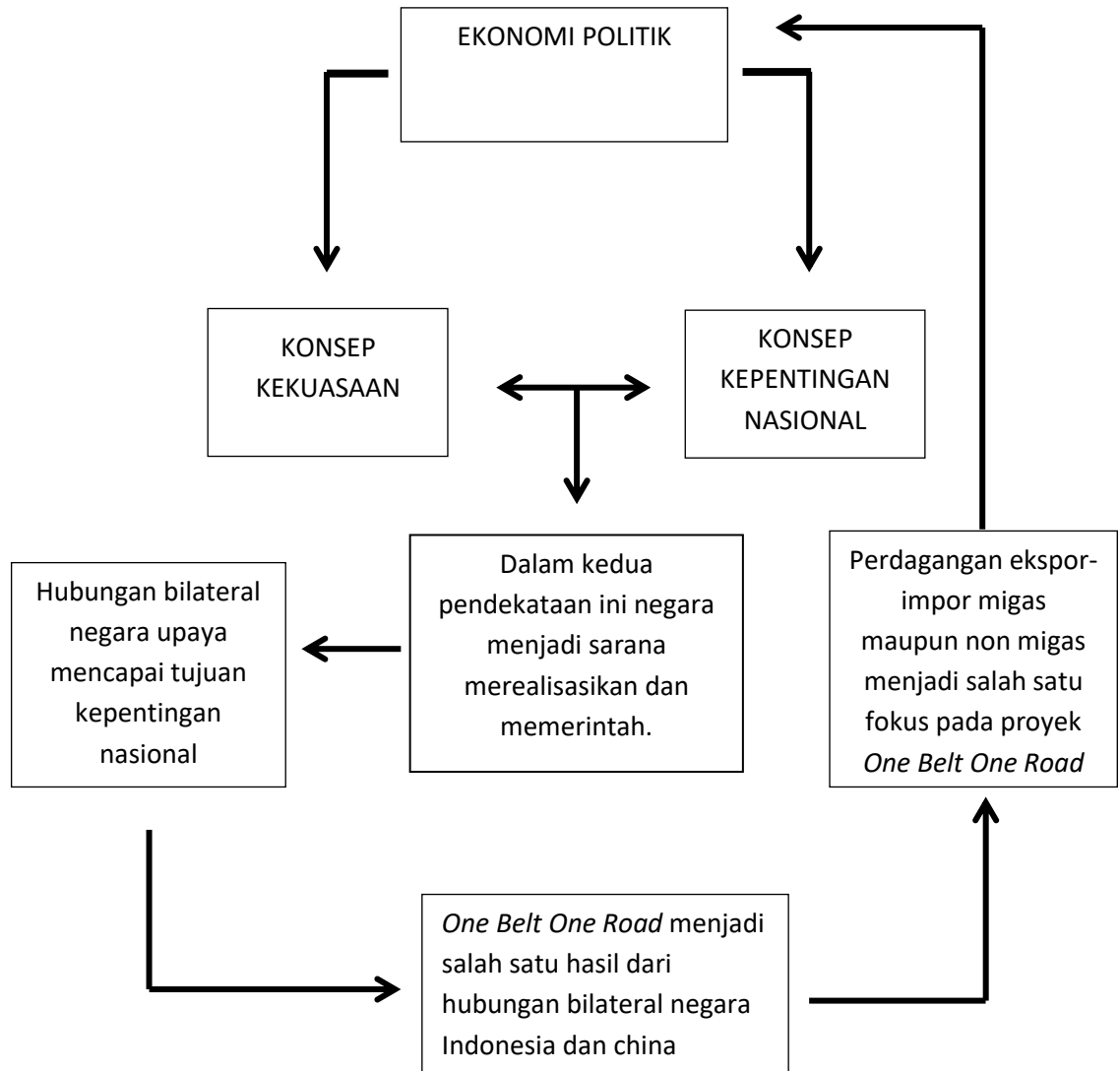
China pada tahun 2004 hingga 2013 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, serta menjelaskan bagaimana perkembangan hubungan antara China dan Indonesia pada awal periode hingga Tahun 2014. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dinamika hubungan Indonesia dan China telah berlangsung sejak era 1950an hingga peresmian kemitraan strategis oleh kedua pemimpin bangsa pada tahun 2005, berjalan dinamis. Meski mengalami pemebekuan hubungan pada masa Soeharto. Selain itu pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia dan China mengalami hubungan yang erat terjalinnya banyak kesepakatan yang mendorong perekonomian Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rihnanda Aviva Fahmi	Penelitian tersebut terfokus pada bagaimana pengaruh insiatif OBOR (<i>One Belt One Road</i>) Tiongkok terhadap perkembangan insfrastrktur di Indonesia pada tahun 2017	Dokumenter dan Penelusuran Data Online	Penelitian ini memiliki kesaamaan dalam membahas peran hubungan Indonesia dalam OBOR China	Dalam penelitian ini lebih membahas tentang dampak OBOR (<i>One Belt One Road</i>) terhadap Infrastruktur

2.	Engra Rahmadoni	Kebijakan Ekonomi Dan Politik Indonesia Memilih Bekerjasama Dengan Tiongkok Dari Pada Jepang Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahun 2015	metode kualitatif	Penelitian ini memiliki kesamaan membahas hubungan Indonesia dan China	penelitian ini membahas bagaimana hubungan Indonesia dan China di segi kerjasama internasional, dimana Tiongkok bekerjasama dengan Indonesia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
3	Nahdia Rachmayanti	Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)	metode deskriptif	Penelitian sama-sama membahas bagaimana hubungan Indonesia dan China	Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana hubungan bilateral dan politik luar negeri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Ekonomi politik merupakan suatu teori yang menelaah politik dan ekonomi dalam suatu isu yang sama, dalam ekonomi politik konsep kekuasaan serta konsep kepentingan nasional menjadi suatu pendekatan. Negara menjadi salah satu sarana pada pendekatan kedua konsep ini, negara berperan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat serta kepentingan negara itu sendiri melalui kepentingan nasional dan

presiden itu sendiri yang memberikan keputusan melalui menteri-mentrinya atau melalului kebijakannya, dimana negara melalui presiden serta jajaran nya mengatur pasar itu sendiri, baik pasar domestik atau pasar global. Dalam kepentingan nasional tidak hanya di sekitaran domestik saja namun luar negeri pun akan pasti terjadi, oleh sebab itu negara melalui kebijakan presiden meski melakukan hubungan bilateral dengan negara lain agar supaya kepentingan negara dapat tercapai. Indonesia dan China melakukan hubungan bilateral yang erat di beberapa yang meyakinkan presiden untuk ikut bergabung dalam proyek negara China yaitu *One Belt One Road*, pada proyek ini selain salah satu yang menjadi kepentingan nasional negara Indonesia itu sendiri. Indonesia pun mengalami beberapa keuntungan salah satu keuntungan itu terjadi pada sektor perdagangan ekspor-impor. Dalam hal ini perdagangan ekspor-impor baik berupa migas atau Non migas baik yang dikelola oleh negara atau perorangan menjadi salah satu isu ekonomi politik dalam hubungan antara Indonesia dan China.